



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN
KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



OLEH :

MUHAMMAD RYAN HABIBILLAH
NIM. 11624104181

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS

مكتبة الجامعة
UNIVERSITY LIBRARY

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-7077837
Fax. 0761-21129 Web : www.lib.uin-suska.ac.id E-mail : lib@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH” yang di tulis oleh :

Nama : Muhammad Ryan Habibillah

Nim : 11624104181

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk dijadikan dalam sidang munaqhasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 25 Maret 2021
Pembimbing Skripsi

Dr. H. Abu Samah, MH
NIP. 130 217 087

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"Tugas dan Fungsi KUA dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 di KUA Kecamatan Payung Sekaki Menurut Perspektif Fiqh Siyasah"*, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Ryan Habibillah
 NIM : 11624104181
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 19 April 2021
 Waktu : 08.30 WIB
 Tempat : Ruang Auditorium Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris

Syamsuddin Muir, Lc, MA

Penguji I

Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag

Penguji II

Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr.Drs.H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005

ABSTRAK

Judul Skripsi dalam penelitian ini adalah “Tugas dan Fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”. Penelitian ini dilakukan di KUA Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu terkait ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan, maka dalam suatu daerah dibentuk suatu KUA yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaannya, di Kota Pekanbaru sendiri KUA berjumlah 12 unit, yang mana terdapat di setiap kecamatan 1 Kantor Urusan Agama.

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016?; 2. Apa saja faktor kendala yang dihadapi dalam pemberian pelayanan di KUA Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016?; 3. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menurut perspektif fiqh siyasah?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dilihat dari jenisnya adalah hukum sosiologis yang bersifat lapangan (*field research*), yaitu dengan cara survey langsung kelapangan. Jika dilihat dari sifat penelitian maka menggunakan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 kurang berjalan dengan baik. Faktor-faktor yang menjadi kendala diantaranya: Lemahnya sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan anggaran. Dalam perspektif fiqh siyasah KUA sendiri juga terdapat hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mana KUA menjadi *Ahlul Halli Wal ‘Aqdi*, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu atas nama umat dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kata Kunci : *Tugas dan Fungsi KUA, Peraturan Menteri Agama, Perspektif, Fiqh Siyasah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sholawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan keluarganya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi S.1 pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Berkat kerja keras dan do'a serta bantuan dari semua pihak akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan yang berjudul **“Tugas dan Fungsi KUA dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 di KUA Kecamatan Payung Sekaki Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.”**

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu perkenalkan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada :

1. Ibunda dan Ayahanda serta seluruh keluarga atas segala do'a dan perhatiannya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan motivasi yang sangat berharga bagi penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Suska Riau yang telah memberi nasehat dan telah mempermudah jalan penulis selama proses pembuatan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Abu Samah, M.H selaku pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Hj. Irda Misraini, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang selama ini memberikan motivasi dan saran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Rusydi, M.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki beserta pegawai dilingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki yang telah membantu penulis dalam pembuatan skripsi
8. Kepada rekan-rekan mahasiswa/i HTN'16 dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Pekanbaru, Februari 2021

Penulis

Muhammad Ryan Habibillah
NIM: 11624104181

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Sejarah dan Tata Kerja KUA Payung Sekaki.....	20
B. Demografi.....	22
C. Sosial dan Ekonomi	27
D. Visi, Misi, dan Moto KUA Kecamatan Payung Sekaki	29
E. Jenis Pelayanan Publik di KUA	30
F. Program Strategis KUA Kecamatan Payung Sekaki.....	36
G. Gambaran Umum tentang Struktur dan Unit Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki	37
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Pelayanan dan Pelayanan Publik	43
B. Jenis - jenis Pelayanan dan Pola Pelayanan.....	45
C. Tujuan Pelayanan Publik	47
D. Prinsip Pelayanan Publik	48
E. Asas Pelayanan Publik.....	49
F. Standar Pelayanan Publik	51
G. Dimensi Pelayanan Publik.....	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pelaksanaan Pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016	54
B. Faktor-faktor yang Menjadi Kendala dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016	71
C. Bagaimana Implementasi Tugas dan Fungsi KUA dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat menurut Perspektif Fiqh Siyasah	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel	15
Tabel II.1	Jumlah Jumlah RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) Menurut Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019.....	23
Tabel II.2	Jumlah Penduduk di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019 .	23
Tabel II.3	Daftar Mata Pencaharian di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019.....	24
Tabel II.4	Jumlah Sekolah di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019	25
Tabel II.5	Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019.....	25
Tabel II.6	Jumlah Sarana Perekonomian di Kecamatan Payung Sekaki 2019.....	28
Tabel II.7	Daftar pegawai beserta bagian/unit yang bertugas di Kecamatan Payung Sekaki	41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Grafik Data Sarana Perekonomian yang Mengalami Penambahan.....	30
Gambar II.2	Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.....	41





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat di dalam sumber ajarannya, Al-Quran dan Hadis, tampak amat ideal dan agung.

Sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian sumber ajaran islam ialah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat islam. Dalam penjelasan fiqh bukan hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan ritual semata, tapi juga seluruh aspek kehidupan manusia dari mulai hubungan pribadinya dengan dirinya sendiri, Tuhannya, keluarganya, lingkungan masyarakatnya serta dengan orang yang diluar agama dan negaranya.

Sesuai dengan perspektif fiqh siyasah seorang faqih/ahli hukum Islam diharapkan mampu memberikan responden menunjukkan jalan keluar dari setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai diakibatkan kemajuan dari teknologi tanpa harus kehilangan identitasnya. Prinsip-prinsip umum/dalil-dalil kulliy di dalam fiqh siyasah, merupakan identitas yang dimaksud, dan menduduki kedudukan yang strategis. Prinsip umum dan dalil kulliy ini dapat berupa Al-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Qur'an dan Hadits Nabi, Maqhasid al-syari'ah, kaidah-kaidah fiqhiyah kulliyah, dan ruh al-hukum (semangat ajaran).

Siyasah *dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.¹

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran

¹ Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 177

² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 47

2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintah. Sedangkan para fuqaha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
3. Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada kepala negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
4. Fakta sejarah Islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.³

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58, disebutkan bahwa dianjurkan menyerahkan urusan pemerintahan dan keadilan kepada pemimpin yang layak dan adil.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS An-Nisa' : 58)*⁴

Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59, Ayat ini mengatakan kepada kaum Mukmin, selain taat kepada Tuhan dan Rasulnya, maka haruslah kalian taat kepada para pemimpin yang adil. Karena ketaatan itu merupakan kelaziman iman kepada Tuhan dan Hari Kiamat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

³ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 1997) hlm 168

⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS An-Nisa' : 59)*⁵

Negara Indonesia mempunyai falsafah yang mengatur kehidupan masyarakatnya dalam bernegara, falsafah ini juga mencakup tentang kehidupan beragama masyarakatnya, yang mana tertuang pada sila pertama, berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari sila ini kita belajar bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai ketuhanan yang ruang lingkupnya adalah agama.

Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 29 ayat (2), "*negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*".⁶

Ketentuan pasal 29 UUD 1945 yang menyatakan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung makna bahwa negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan - kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka dalam suatu daerah dibentuk suatu Kantor Urusan Agama (KUA), di Kota Pekanbaru sendiri Kantor Urusan Agama berjumlah 12 yang mana bertempat di setiap Kecamatan berjumlah 1 Kantor Urusan Agama.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat 2

Kantor Urusan Agama sendiri diatur tugas dan fungsinya pada Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Nawawi mengatakan bahwa organisasi akan berfungsi jika para pemimpin memiliki kemampuan mengambil keputusan dan memerintahkan pelaksanaannya kepada anggota organisasi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.⁷

Artinya seorang pemimpin dalam mengambil keputusan tentunya harus memiliki strategi pengambilan keputusan sehingga keputusan tersebut bisa diterima oleh anggota organisasi dan organisasi dapat berjalan sesuai yang ditargetkan pimpinan.

Dalam pengambilan keputusan biasanya ada yang berakibat baik ataupun buruk dan terdapat masalah di dalamnya. Secara umum, yang dimaksud dengan masalah adalah tidak adanya keseimbangan / kesesuaian antara yang harus dilakukan (*should*) dengan kondisi sekarang. Masalah juga dapat dilihat dari perbedaan antara standar pelaksanaan (yang ingin dilaksanakan) dengan pelaksanaan yang dilakukan, perbedaan antara teori dengan praktek, perbedaan antara yang diinginkan dengan yang terjadi, perbedaan antara yang seharusnya dengan pada kenyataannya, perbedaan antara teori dengan teori, dan perbedaan antara program / rencana kerja dengan hasil kerja.

Pelayanan merupakan cara melayani, jasa, atau kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Pelayanan dapat didefinisikan

⁷ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1993) hlm.55-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.⁸

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/2004 adalah pemberian layanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik dapat di artikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah perwujudan dari fungsi aparaturnya sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara.⁹

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pemerintah juga memiliki peran untuk melaksanakan fungsi pelayanan.

Pelayanan itu sendiri disediakan pada berbagai lembaga atau institusi pemerintah seperti halnya Pusat Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyediakan pelayanan di bidang urusan agama islam dalam wilayah Kecamatan.¹⁰ Di dalam negara RI yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkutan dengan

⁸ Abdul Jamil Wahab, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2014) hlm 106

⁹ Hardiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011) hlm. 15

¹⁰ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hlm 179

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan.

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh KUA adalah pelayanan pelaksanaan pencatatan nikah. Pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan dalam hal ini pegawai mencatat pada saat akan melangsungkan akad perkawinan antara calon suami dan istri.¹¹ Pencatatan nikah dilakukan oleh para pegawai, di dalam hal ini dalam pelaksanaan pelayanan haruslah memiliki kinerja yang baik, karena kinerja yang baik merupakan bentuk dari tercapainya tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kualitas pelayanan. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pegawai sesuai dengan tanggung-jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya.

Realisasi pencatatan itu, melahirkan kutipan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami. Kutipan akta nikah tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Pemerintah juga telah mengatur masalah biaya pernikahan yang dilakukan di jam kerja KUA dan di luar KUA dari jam kerja, yakni terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 yang sebelumnya adalah perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004.

Dalam permasalahan ini semua tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama berorientasi pada Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama kecamatan. Pada pasal 2 dan 3 yang berbunyi :

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm 26

Pasal 2 :

KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Pasal 3 :

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KUA

Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan;
4. pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
7. pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
8. pelayanan bimbingan zakat dan wakaf;
9. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan.

(2) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KUA

Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler.¹²

Menurut Sulaiman, tugas dan fungsi KUA diantaranya, melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan nikah; mengurus dan

¹² Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah sosial; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.¹³

Menurut Syarifuddin, bahwa tugas dan fungsi KUA diantaranya, melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai kebijakan yang ditetapkan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.¹⁴

Namun kenyataannya berdasarkan survei penulis di lapangan menemukan masih ada terjadi kekurangan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat seperti: pelaksanaan pencatatan nikah yang masih kurang baik, pelaksanaan bimbingan keluarga sakinah yang belum tersosialisasi dengan baik, dan masih kurang lengkapnya penyusunan statistik layanan yang berguna untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik (KIP) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki.

Untuk mengetahui pelayanan terhadap masyarakat, dan faktor - faktor yang menjadi kendala dalam pelayanan, penulis merasa perlu diadakan penelitian dengan judul: **“Tugas dan Fungsi KUA dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 di KUA Kecamatan Payung Sekaki Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.”**

¹³ Sulaiman, *Problematisasi Pelayanan Kantor Urusan Agama Anumban Timur Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, hlm 248

¹⁴ Syarifuddin, *Fungsional Jabatan Penghulu dan Pengurusnya terhadap Kinarja KUA Kecamatan di Kota Manado*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Manado, hlm 67

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini, serta tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka penulis dalam hal ini dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini dilakukan pada KUA Kecamatan Payung Sekaki yang difokuskan kepada tugas dan fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 di Kecamatan Payung Sekaki Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016?
3. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menurut perspektif fiqh siyasah?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kualitas yang diberikan oleh KUA Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor kendala yang dihadapi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016.
- c. Untuk mengetahui bagaimana implementasi tugas dan fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menurut perspektif fiqh siyasah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- b. Sebagai bahan kajian dan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan KUA kepada masyarakat
- c. Sebagai sumbangan untuk menambahkan khazanah ilmu pengetahuan tempat penulis menuntut ilmu.
- d. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan bagi pemerintah (Departemen Agama) atau instansi terkait dalam merumuskan kebijakan mengenai pelayanan kepada masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian. Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis,

yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.¹⁵

Untuk menjawab persoalan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah hukum sosiologis yang bersifat lapangan (*field research*), yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang dilakukan langsung kepada responden melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Pada penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di KUA Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Selain itu lokasi tersebut sangat

¹⁵ Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007) hlm 15

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003) hlm 133

¹⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009) hlm 11

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mudah dijangkau oleh peneliti untuk melakukan observasi, wawancara, dan pengkajian dari permasalahan yang ada.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA, Penghulu KUA, Staff KUA dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tugas dan fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 di Kecamatan Payung Sekaki Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.¹⁸

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian.

¹⁸ Yuyun Suria Sumantri, *Ilmu dalam Perspektif: Kumpulan Karangan tentang Hakikat Ilmu*, (Jakarta: Gramedia, 2009) hlm. 49

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1.	Kepala KUA Kecamatan Payung Sekaki	1 orang	1 orang	100 %
2.	Penghulu KUA Kecamatan Payung Sekaki	2 orang	2 orang	100 %
3.	Staff KUA Kecamatan Payung Sekaki	7 orang	2 orang	28,57 %
4.	Masyarakat yang mengurus berkas pada hari wawancara	8 orang	2 orang	25 %
5.	Tokoh Masyarakat	7 orang	2 orang	28,57%

6. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti dan fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.

Dalam penelitian ini adapun sumber sumber data penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini.¹⁹ Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan langsung (partisipan) dan tidak berperan serta. Pengamatan terbagi menjadi dua, yaitu pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan bisa juga menggunakan teknik terstruktur dan tidak terstruktur. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku informan dan yang lainnya, seperti dalam keadaan yang semestinya. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dengan metode ini peneliti dalam observasi berada dalam keadaan yang wajar tanpa ada rekayasa yang dibuat-buat.

¹⁹ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Semarang: Mandar Maju, 2004) hlm 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Sebelum dilaksanakan wawancara terhadap informan, maka disusun pedoman wawancara yang mengacu pada tujuan studi. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Wawancara ini bisa dilakukan secara terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka langsung (face to face) maupun dengan menggunakan telepon. Teknik wawancara yang digunakan peneliti dilapangan yaitu menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur karena beberapa kendala pada informan. Pemilihan teknik wawancara tidak terstruktur ini untuk menghindari ketidaknyamanan informan.

c. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Peranan studi kepustakaan sebelum penelitian sangat penting sebab dengan melakukan kegiatan ini hubungan antara masalah, penelitian-penelitian yang relevan dan teori akan menjadi lebih jelas. Selain itu

penelitian akan lebih ditunjang, baik oleh teori-teori yang sudah ada maupun oleh bukti nyata, yaitu hasil-hasil penelitian, kesimpulan dan saran.

7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.²⁰

Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

F. Sistematika Penelitian

BAB I : Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Umum

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian serta juga menguraikan tentang sejarah dibentuknya KUA, Peran KUA, Fungsi KUA, serta Visi dan Misi KUA.

²⁰ <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Tinjauan Teoritis

Berisi tentang tinjauan teoritis tugas dan fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 di KUA Kecamatan Payung Sekaki menurut perspektif fiqh siyasah.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang hasil kajian dan penelitian yang didapat dari lapangan dengan pembahasan rinci yang meliputi pelaksanaan tugas dan fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 di KUA Kecamatan Payung Sekaki Menurut Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi tentang uraian hasil dari penelitian secara ringkas yang terdapat dalam bentuk kesimpulan dan saran serta tindak lanjut yang dapat dilakukan, baik dari aspek akademis maupun kebijakan

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah dan Tata Kerja KUA Payung Sekaki

KUA Kecamatan Payung Sekaki KUA (Kantor Urusan Agama) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdiri pada tahun 2005 dan merupakan KUA yang terletak di Jalan Sido Rukun yang mana KUA ini adalah instansi yang di pimpin oleh seorang Kepala KUA, yang bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing, serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki yang dipimpin oleh kepala KUA mempunyai tugas memimpin, mengorganisasikan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi KUA kepada kepala kantor Kementrian Agama Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan tugas kepala KUA dibantu oleh pejabat fungsional khusus dan umum. Pejabat fungsional khusus merupakan jabatan fungsional penghulu dan jabatan fungsional lain yang dibutuhkan oleh KUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat fungsional umum merupakan jabatan pelaksana yang membidangi pelayanan administrasi dan kerumah tanggaan KUA.

Sebagai unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, KUA harus lebih banyak bergerak dalam tataran teknis yang langsung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersentuhan dengan masyarakat di level bawah dan keluarga. Kekompakan aparatur pemerintah di kecamatan termasuk KUA bersama masyarakat tentunya akan membawa dampak positif mewujudkan visi Kementerian Agama yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir dan batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.²¹

Dengan letak serta wilayahnya yang sangat strategis di pusat Kecamatan Payung Sekaki, menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki sebagai salah satu perwakilan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang langsung berhadapan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, eksistensi KUA kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat kecamatan.

B. Demografi

1. Luas Wilayah

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Untuk itu tidak ada salahnya untuk kita memahami terlebih dahulu tentang kecamatan ini, yang mana kecamatan ini terdiri dari 7 kelurahan, memiliki 42 RW dan 187 RT. Luas wilayah Kecamatan Payung Sekaki adalah 51,36 km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

²¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/KantorUrusanAgama>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kelurahan Labuh Baru Timur : 11,80 km²
- b. Kelurahan Tampan: 4,45 km²
- c. Kelurahan Air Hitam: 5,46 km²
- d. Kelurahan Labuh Baru Barat: 8.80 km²
- e. Kelurahan Bandar Raya: 8.90 km²
- f. Kelurahan Sungai Sibam: 6,40 km²
- g. Kelurahan Tirta Siak: 5,55 km²

2. Batas-batas Wilayah KUA Kecamatan Payung Sekaki :

- a. Sebelah timur: berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Senapelan
- b. Sebelah barat: berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- c. Sebelah utara: berbatasan dengan Kecamatan Rumbai
- d. Sebelah selatan: berbatasan dengan Kecamatan Tampan dan Kecamatan Marpoyan Damai.

3. Jumlah RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) Menurut Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki

Kecamatan Payung Sekaki terdiri dari 7 kelurahan, 42 RW dan 187 RT. Pada Tahun 2019 Terdapat 21.254 Kepala Rumah Tangga.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Jumlah Jumlah RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga)
Menurut Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019

No	Kelurahan	Status Pemerintahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Labuh Baru Timur	Kelurahan	58	12
2	Tampan	Kelurahan	16	4
3	Air Hitam	Kelurahan	16	3
4	Labuh Baru Barat	Kelurahan	43	10
5	Bandar Raya	Kelurahan	19	4
6	Sungai Sibam	Kelurahan	8	4
7	Tirta Siak	Kelurahan	27	5
	Jumlah		187	42

Sumber : Kantor Camat Payung Sekaki

4. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Payung Sekaki mencapai 90.901 jiwa. Yang terdiri dari 46.469 Laki-laki dan 44.432 Perempuan. Dan Kelurahan Labuh Baru Timur menjadi kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu sebanyak 33.416 jiwa. Untuk lebih lengkap nya perhatikan tabel dibawah ini :

Tabel II.2
Jumlah Penduduk di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Labuh Baru Timur	19.874	13.542	33.416
2	Tampan	3.815	4.781	8.596
3	Air Hitam	2.114	2.524	4.638
4	Labuh Baru Barat	7.381	8.520	15.901
5	Bandar Raya	4.108	4.808	8.916
6	Sungai Sibam	3.228	3.656	6.884
7	Tirta Siak	5.949	6.601	12.550
	Jumlah	46.469	44.432	90.901

Sumber : Kantor Camat Payung Sekaki

5. Mata Pencarian

Dilihat dari status ekonomi, masyarakat yang tinggal di Kecamatan Payung Sekaki mempunyai beragam mata pencarian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai pedagang, Berdasarkan data yang diperoleh melalui Kantor Camat Payung Sekaki, bahwa sumber kehidupan ekonomi masyarakat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Jumlah Penduduk yang Bekerja menurut Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki, 2019 :

Tabel II.3
Daftar Mata Pencarian di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019

No	Kelurahan	Perkebunan	Perikanan	Peternakan	Pertanian	Industri Pengolahan	Perdagangan	Jasa	Angkuatn	Lainnya
1	Labuh Baru Timur	-	-	-	-	1243	4780	4243	3501	551
2	Tampar	4	-	5	-	714	889	780	1013	268
3	Air Hitam	9	11	7	9	284	864	399	242	162
4	Labuh Baru Barat	11	-	6	7	1282	1656	1431	1452	969
5	Bandar Raya	36	-	27	12	707	914	789	802	534
6	Sungai Sibam	13	-	6	4	553	714	617	626	417
7	Tirta Siak	8	31	10	5	1023	1351	1116	1452	382
	Jumlah	81	42	61	37	5806	11178	9375	9088	3283

Sumber : Kantor Camat Payung Sekaki

Dari tabel diatas kita dapat menyimpulkan bahwa perdagangan merupakan mayoritas pekerjaan yang ada di Kecamatan Payung Sekaki yaitu sebanyak 11178, kemudian disusul oleh jasa sebanyak 9378, kemudian disusul oleh angkutan sebanyak 9088 kemudian disusul oleh industri pengolahan sebanyak 5806, kemudian di susul oleh pekerjaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkebunan sebanyak 81 orang, kemudian peternakan 61 orang, mata pencaharian perikanan sebanyak 42 orang, mata pencaharian pertanian sebanyak 37 orang dan kemudian ada sekitar 3283 yang mata pencaharian lainnya, maka dari data tersebut mata pencaharian yang paling banyak di Kecamatan Payung Sekaki yaitu perdagangan.

6. Pendidikan

Menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita-cita yang diharapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan, adalah tujuan pendidikan.

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyumbangkan kemampuan usaha manusia dalam rangka memajukan aktivitas. Pendidikan sebagai suatu aspek yang menyumbangkan sumber daya manusia yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan seseorang dalam berbagai kegiatan, juga diharapkan mampu membuka cara berpikir ekonomis dalam arti mampu mengembangkan potensi yang ada untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin.²²

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kecamatan Payung sekaki dalam publikasi ini disajikan mengenai data pendidikan meliputi data TK, SD, SLTP dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta.

²² Mujamil Qomar, *Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012) hlm 19-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut adalah data statistik jumlah sekolah menurut jenisnya di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019 :

Tabel II.4
Jumlah Sekolah di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019

No	Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	SMK
1	Labuh Baru Timur	6	4	2	2	2
2	Tampan	5	2	3	-	1
3	Air Hitam	5	3	3	1	1
4	Labuh Baru Barat	7	5	2	1	1
5	Bandar Raya	3	3	2	1	1
6	Sungai Sibam	2	1	1	-	-
7	Tirta Siak	3	6	2	2	5
	Jumlah	31	24	15	7	11

Sumber : Kantor Camat Payung Sekaki

7. Agama

Data yang dikumpulkan Kementerian Agama Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2019 di Kecamatan Payung sekaki terdapat 89 masjid, 15 gereja dan 9 vihara.

Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Kelurahan di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel II.5
Jumlah Tempat Ibadah di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2019

Kelurahan	Masjid	Musholla	Gereja	Pura	Vihara	Lainnya	Jumlah
Labuh baru timur	27	7	4	-	-	-	38
Tampan	8	1	1	-	1	-	11
Air Hitam	6	5	2	-	6	-	19
Labuh Baru Barat	17	1	20	-	-	-	20
Bandar Raya	11	4	5	-	2	-	22
Sungai Sibam	10	1	1	-	-	-	12
Tirta Siak	10	3	-	-	-	-	13
Jumlah	89	22	15	-	9	-	135

Sumber : Kantor KUA Kecamatan Payung Sekaki

C. Sosial dan Ekonomi

1. Adat Istiadat dan Sosial Budaya

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang harus dihadapi masyarakat dan anggota-anggotanya seperti kekuatan alam, maupun kekuatan-kekuatan lainnya didalam masyarakat itu sendiri yang tidak selalu baik baginya.²³ Sedangkan sosial budaya itu sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu sosial dan budaya. Sosial dalam kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat di Kecamatan Payung Sekaki yang mempunyai bermacam-macam suku dan budaya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kecamatan Payung Sekaki hidup dalam keadaan harmonis, rukun dan damai, jarang terjadi pembenturan dan tidak pernah terjadi kejadian anarkis antara sesama suku tersebut. Adapun suku-suku yang terdapat di Kecamatan Payung Sekaki adalah sebagai berikut:

- a. Suku Minangkabau
- b. Suku Melayu
- c. Suku Jawa
- d. Suku Batak
- e. Suku Tionghoa
- f. Dan lain-lain

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) hlm 194

Diantara suku tersebut mempunyai adat-istiadat tersendiri dalam masing-masing suku, seperti dalam acara keramaian tiap-tiap suku menampilkan kesenian sukunya sendiri.

2. Kondisi Perekonomian Masyarakat

Salah satu unsur peningkatan perekonomian di suatu daerah adalah terletak pada sarana perekonomian yang mana di kecamatan payung sekaki sendiri pada umumnya pertumbuhan perekonomian masyarakat sangat cepat dan bisa di rasakan dari tahun ke tahun, yaitu meningkat nya dari jumlah pekerja dalam berbagai sektor bidang pekerjaan yang ada didalam masyarakat. Berikut merupakan tabel :

Tabel II.6
Jumlah Sarana Perekonomian di Kecamatan Payung Sekaki 2019

No	Kelurahan	Pasar Rakyat
1	Labuh Baru Timur	2
2	Tampan	1
3	Air Hitam	-
4	Labuh Baru Barat	2
5	Bandar Raya	-
6	Sungai Sibam	1
7	Tirta Siak	1
	Jumlah	7

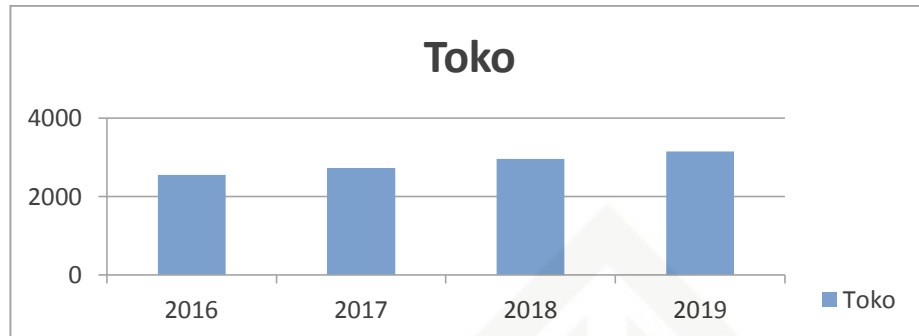
Sumber : Kantor Camat payung Sekaki

Salah satu sarana perekonomian yang mengalami penambahan dari tahun sebelumnya adalah jumlah toko pada tahun 2016 sebanyak 2547 dan 2017 sebanyak 2729 dan 2018 sebanyak 2963 dan bertambah menjadi 3146 toko pada tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.1
Grafik Data Sarana Perekonomian yang Mengalami Penambahan



Sumber : Kantor Camat Payung Sekaki

D. Visi, Misi, dan Moto KUA Kecamatan Payung Sekaki

1. Visi KUA

Visi dari KUA Kecamatan Payung Sekaki adalah sebagai berikut:
 “Terwujudnya masyarakat Islam Kec. Payung Sekaki yang memenuhi ajarannya serta memiliki kepribadian Melayu”

2. Misi KUA

Misi KUA Kecamatan Payung Sekaki adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah dan rujuk
- b. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa umat islam melalui keluarga sakinah dan optimalisasi masjid.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas haji, zakat, wakaf, dan ibadah sosial
- d. Memberdayakan secara optimal lembaga-lembaga keagamaan di Kecamatan Payung Sekaki.

3. Moto KUA

Moto KUA Kecamatan Payung Sekaki adalah sebagai berikut: “Pelayananku adalah ibadahku”.

E. Jenis Pelayanan Publik di KUA Kecamatan Payung Sekaki

1. Jenis layanan: Pencatatan pernikahan

a. Persyaratan pelayanan :

- 1) Surat pengantar pernikahan (Model N1) dari Kelurahan / Desa tempat tinggal calon pengantin.
- 2) Fotocopy akta kelahiran, KTP, dan KK
- 3) Surat rekomendasi pernikahan dari KUA Kecamatan bertempat (Model N2) (bagi calon yang menikah diluar wilayah kecamatan tempat tinggalnya).
- 4) Surat persetujuan kedua calon pengantin (Model N3)
- 5) Surat izin orang tua/wali bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun.
- 6) Izin Dispensasi Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang kurang 19 tahun.
- 7) Surat Izin dari atasannya/Kesatuannya bagi calon pengantin anggota TNI/Polri.
- 8) Izin Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
- 9) Akta cerai bagi duda/janda
- 10) Akta kematian atau Surat Keterangan Kematian suami/istri bagi janda /duda ditinggal mati (Model N6)
- 11) Surat dispensasi camat tempat akad dilaksanakan bagi pernikahan yang kurang dari 10 hari kerja dari pendaftaran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12) Pas photo background biru ($2 \times 3 = 4$ lembar dan lembar $4 \times 6 = 1$ lembar) beserta softcopy

b. Jangka waktu penyelesaian :

- 1) Pendaftaran pernikahan : 15 menit
- 2) Pemeriksaan berkas calon pengantin : 30 menit
- 3) Bimbingan pernikahan : 2 hari
- 4) Pelaksanaan akad nikah : 45 menit

2. Jenis layanan: Duplikat buku nikah

a. Persyaratan pelayanan :

- 1) Surat permohonan pembuatan duplikat buku nikah
- 2) Surat pernyataan bahwa buku nikah hilang atau rusak dari yang bersangkutan diatas materai 6000
- 3) Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
- 4) Bukti fisik buku nikah jika rusak
- 5) Fotocopy KTP dan KK pemohon duplikat buku nikah
- 6) Pas photo $2 \times 3 = 3$ lembar

b. Jangka waktu penyelesaian :

- 1) 30 menit jika pemohon bisa menunjukkan data pernikahan yang jelas
- 2) 1 hari jika pemohon tidak bisa menunjukkan data pernikahan yang jelas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jenis layanan: Legalisir fotocopy buku nikah/duplikat buku nikah

a. Persyaratan pelayanan :

- 1) Membawa dan menunjukkan buku nikah asli / duplikat buku nikah
- 2) Menunjukkan KTP asli yang beralamatkan di wilayah kecamatan payung sekaki bagi yang pencatatan nikahnya dahulu tidak di KUA Kecamatan Payung Sekaki

b. Jangka waktu penyelesaian :

- 1) 10 menit jika buku nikah / duplikat dikeluarkan oleh KUA Payung Sekaki
- 2) 1 hari kerja jika buku nikah dikeluarkan oleh KUA lain.

4. Jenis layanan: Surat rekomendasi pernikahan

a. Persyaratan pelayanan :

- 1) Surat pengantar pernikahan (Model N1) dari Kelurahan / Desa tempat tinggal calon pengantin.
- 2) Fotocopy akta kelahiran, KTP, dan KK
- 3) Surat persetujuan kedua calon pengantin (Model N3)
- 4) Surat izin orang tua / wali bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun.
- 5) Izin Dispensasi Pengadilan Agama bagi calon pengantin yang kurang 19 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Surat Izin dari atasannya / Kesatuannya bagi calon pengantin anggota TNI / Polri.
- 7) Izin Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
- 8) Akta cerai bagi duda/janda
- 9) Akta kematian atau Surat Keterangan Kematian suami/istri bagi janda /duda ditinggal mati (Model N6)
- 10) Fotocopy 1 rangkap seluruh syarat diatas
- 11) Pas photo 3x4=2 lembar

b. Jangka waktu penyelesaian :

- 1) 10 menit

5. Jenis layanan: Surat kuasa wali nikah

a. Persyaratan pelayanan :

- 1) Fotocopy KTP, KK, dan Akta kelahiran Calon Pengantin dan Wali Nikah
- 2) Kepastian maskawin (hutang/tunai)
- 3) Dua orang saksi
- 4) Materai 6000

b. Jangka waktu penyelesaian:

- 1) 10 menit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jenis layanan: Bimbingan manasik haji kecamatan

a. Persyaratan pelayanan :

- 1) Sudah terdaftar sebagai calon jamaah haji yang akan berangkat tahun berjalan berdasarkan jumlah kuota dari Kankemenag Kota Pekanbaru.
- 2) Bagi calon jamaah haji cadangan yang apabila keberangkatan maju pada tahun ini juga berdasarkan jumlah kuota dari Kankemenag Kota Pekanbaru.

b. Jangka waktu penyelesaian:

- 1) 8 Pertemuan

7. Jenis layanan: Pendaftaran surat bukti pernikahan luar negeri di KUA

a. Persyaratan pelayanan :

- 1) Buku nikah / sertifikat nikah dari negara dilangsungkan pernikahan
- 2) Surat keterangan dari KBRI
- 3) Fotocopy akta kelahiran suami/istri
- 4) Fotocopy KTP dan KK
- 5) Fotocopy passport suami/istri
- 6) Pas photo 4x6 = 1 lembar dan 2x3 = 2 lembar

b. Jangka waktu penyelesaian :

- 1) 30 menit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Jenis layanan: Konsultasi keluarga sakinah

- a. Persyaratan pelayanan :
 - 1) Fotocopy KTP
 - 2) Fotocopy kutipan akta nikah jika pemohon sudah berkeluarga
- b. Jangka waktu penyelesaian :
 - 1) Minimal 45 menit

9. Jenis layanan: Penerbitan akta ikrar wakaf

- a. Persyaratan pelayanan :
 - 1) Surat kepemilikan tanah (asli)
 - 2) Fotocopy KTP Wakif, Nadzir, dan Saksi
 - 3) Permohonan akta ikrar wakaf dari wakif atau nadzir, jika nadzir berbadan hukum maka harus melampirkan fotocopy akta notaris atau pengesahan dari Menkumham RI.
 - 4) Materai 6000 sebanyak 14 buah
 - 5) Surat kuasa atau persetujuan dari ahli waris jika tidak milik sempurna
 - 6) Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa dari kelurahan /desa.
- b. Jangka waktu penyelesaian :
 - 1) Minimal 3 hari

10. Jenis layanan: Pencatatan itsbat nikah

- a. Persyaratan pelayanan:
 - 1) Salinan putusan pengadilan agama (asli)
 - 2) Pas photo ukuran 2x3 = 4 lembar dan 4x6 = 1 lembar



3) Fotocopy KTP dan KK

b. Jangka waktu penyelesaian :

1) 60 menit

F. Program Strategis KUA Kecamatan Payung Sekaki

Program strategis KUA Payung Sekaki adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepenghuluan Program ini menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pencatatan nikah dengan meningkatkan profesionalisme petugas (peningkatan mutu SDM). Diharapkan ke depan akan terciptanya suasana lingkungan kerja yang harmonis dengan meningkatnya mutu pelayanan sekaligus dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat yang berurusan dengan KUA beserta jajarannya.
2. Mengupayakan peningkatan kualitas kerja pegawai, Misi ini penting seiring dengan peraturan pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil/PP 53. Diharapkan kedepan akan tercipta suasana kerja yang kondusif, sehingga dapat mendukung kelancaran aktivitas kerja dan pelayanan masyarakat secara proporsional dan lingkungan kerja yang nyaman.
3. Mengupayakan terwujudnya keluarga sakinah, Misi program ini bertujuan meningkatkan kualitas pengembangan, pembinaan, bimbingan dan pelayanan di bidang pernikahan dan keluarga sakinah. Diharapkan dapat meningkatnya kualitas kader motivator kelurahan, meningkatnya keluarga sakinah dan meningkatnya kualitas penasehatan calon pengantin.
4. Meningkatkan kualitas peran tempat ibadah, Misi program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan masjid yang ada dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- wilayah Kecamatan Payung Sekaki sehingga diharapkan akan lebih meningkatkan fungsi masjid disamping sebagai sarana ibadah juga dapat berfungsi sebagai tempat pelaksanaan kegiatan sosial umat.
5. Meningkatkan kualitas peran dan fungsi BAZ Kecamatan. Misi ini bertujuan meningkatkan kualitas Badan Amil Zakat yang ada di wilayah Kecamatan Payung Sekaki yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas peran serta fungsi BAZ yang selama ini sudah cukup mendapat perhatian dari pemerintah.

G. Gambaran Umum tentang Struktur dan Unit Kerja KUA Kecamatan Payung Sekaki

Struktur organisasi adalah sebuah garis hirarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan. Dimana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing.

Struktur organisasi merupakan suatu susunan ataupun hubungan antar komponen berbagai bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu organisasi memiliki ketergantungan. Sehingga apabila terdapat sebuah komponen yang baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentu saja akan mempengaruhi organisasi tersebut.²⁴

²⁴ Abdul Sabaruddin, *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) hlm 1

Dalam membentuk suatu organisasi, seharusnya dibuat pula struktur struktur organisasinya. Begitu pula kalau ingin mengenal atau mengetahui gambaran suatu organisasi maka ditinjau dan dipelajari struktur organisasinya. Mempelajari struktur organisasi dapat mengetahui kemungkinan kegiatan-kegiatan apa yang ada dalam suatu organisasi, karena didalam suatu organisasi tergambar bagian-bagian (departemen) yang ada, nama dan posisi setiap manajer, dimana garis penghubung didalamnya menunjukan siapa atau bagian atau bertanggung jawab kepada siapa atau bagian apa.²⁵

Para peneliti dan praktisi manajemen telah berusaha mengembangkan pemahaman mereka mengenai hubungan antara struktur dan kinerja, sikap, keefektifan, dan variabel lain yang dirasa penting. Pengembangan pemahaman ini dihalangi tidak hanya oleh kerumitan hubungan antara dimensi-dimensi itu sendiri, namun juga oleh kesulitan menetapkan dan mengukur konsep struktur organisasi.

Agar struktur organisasi dapat mendukung pencapaian tujuan hendaknya mengandung 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Cara (sistem) Pendelegasian Tugas dan Wewenang

Pendelegasian tugas dan wewenang yang jelas memungkinkan tenaga kerja mengetahui tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dan yang menjadi tanggung jawabnya.

²⁵ Ahmad Subkhi dan Mohammad Januar, *Pengantar Teori Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2013) hlm 58

2. Koordinasi

Jika pendelegasian tugas dan wewenang sudah jelas maka keadaan tersebut harus diikuti oleh koordinasi, sebab setiap individu maupun bagian dalam organisasi perusahaan sudah mengetahui posisi, tugas, wewenang yang dimiliki. Dengan kata lain koordinasi diperlukan untuk mengatur kondisi tersebut.

3. Komunikasi

Agar koordinasi dapat diterapkan, maka perlu komunikasi yang bermanfaat untuk mendekatkan setiap tenaga kerja maupun kelompok kerja. Hal tersebut dimaksudkan untuk saling memberikan informasi antara tenaga kerja maupun kelompok kerja. Tanpa komunikasi akan terjadi kondisi yang membingungkan dan tidak mendukung aktivitas-aktivitas dalam upaya pencapaian sasaran dari organisasi tersebut.

Struktur Organisasi dari KUA Payung Sekaki Pekanbaru akan membantu pimpinan dalam menentukan suatu alur kerja yang teratur dan terarah dimana setiap bagian dapat bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu instansi / perusahaan. Struktur organisasi yang baik akan mempermudah Pegawai/Staff untuk mengetahui kepada siapa masing-masing individu bertanggung jawab dan sampai sejauh mana tanggung jawab dan tugas yang dibebankan kepadanya.

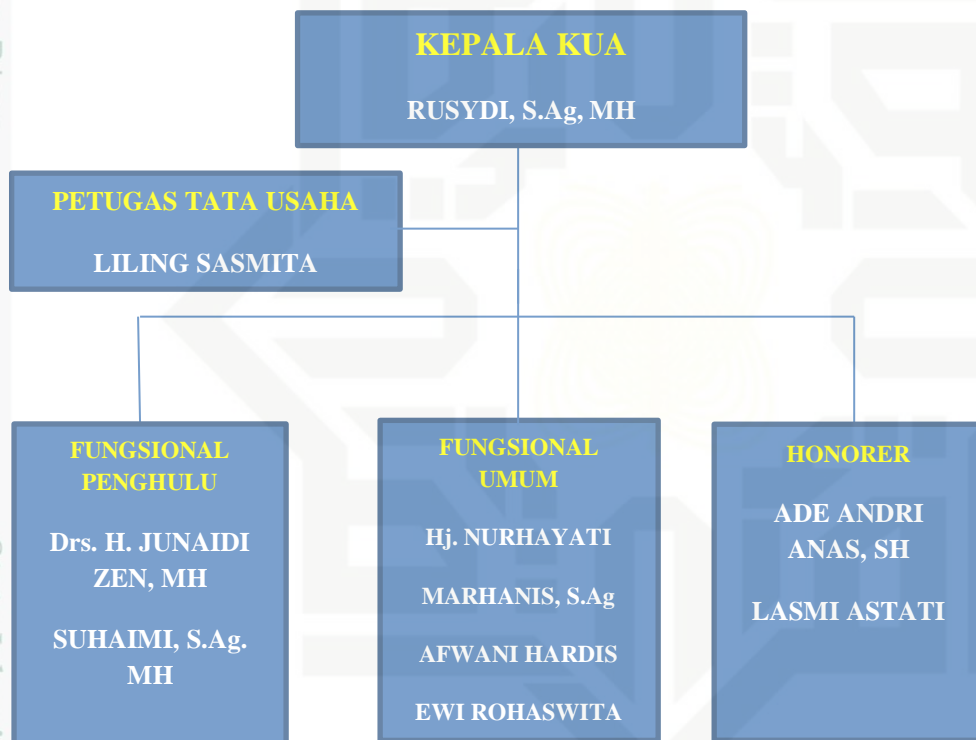
Struktur organisasi suatu perusahaan/Instansi belum tentu sama dengan struktur perusahaan/Instansi lainnya yang sejenis, karena hal tersebut disusun berdasarkan strategi perusahaan/Instansi, sesuai dengan keadaan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan perusahaan/Instansi yang bersangkutan. Secara hierarki struktur organisasi dipimpin oleh seorang Kepala KUA, yang bertugas memimpin KUA yang dibantu oleh Penghulu dan Staf lainnya.

Adapun Struktur Organisasi dari KUA Payung Sekaki Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Gambar II.2
Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru



Sumber : Kantor KUA Kecamatan Payung Sekaki

Didalam suatu Instansi Pemerintahan terdapat bagian / unit yang bertugas menjalankan dan melaksanakan berbagai kegiatan. Berikut ini adalah daftar pegawai beserta bagian / unit yang bertugas dikantor KUA Payung Sekaki Kota Pekanbaru :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.7
Daftar pegawai beserta bagian/unit yang bertugas di Kecamatan Payung Sekaki

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT / GOL
1	Rusydi, S.Ag, MH	197504092005011007	Kepala	Pembina, IV/a
2	Drs. H. Junaidi, MH	196708201996031002	Penghulu	Pembina, IV/a
3	Suhaimi, S.Ag, MH	197102092002121002	Penghulu	Penata TK.I, III/d
4	Marhanis, S.Ag	197609042009122003	Staf	Penata, III/c
5	Hj. Nurhayati	197001011993032007	Staf	Penata Muda TK.I, III/b
6	Afwani Hardis	196512171992032000	Staf	Penata Muda TK.I, III/b
7	Ewi Rohaswita	197011232014112001	Staf	Pengatur Muda, II/a
8	Liling Sasmita	198408232014112001	Staf	Pengatur Muda, II/a
9	H. Mohd. Rasyid, S.Ag	196312312000031032	Peny.Agama	Pembina, IV/a
10	Busihat, S.Ag, MH	197401102007011022	Peny.Agama	Pembina, IV/a
11	Ana Riana, M.pd	197409252009012005	Peny.Agama	Penata, III/c
12	Sutan Syahril, S.Ag	197508282014111001	Peny.Agama	Penata Muda, III/a
13	Ade Andri Anas, SH		Honoror	-
14	Lasmi Astaty		Honoror	-

Sumber : Kantor KUA Kecamatan Payung Sekaki

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur sipil negara (ASN) kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Karena itu, kedudukan aparatur sipil negara (ASN) dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.²⁶

Selain itu, dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, KUA dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan dialogis dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis.

Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana KUA dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan suatu pelayanan yang ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, KUA dituntut untuk menerapkan prinsip equity, Artinya pelayanan yang diberikan tidak boleh diberikan secara diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas pelayanan-pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

²⁶ Surjadi, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012) hlm 7



BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pelayanan dan Pelayanan Publik

Pelayanan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cara melayani, jasa, atau kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Menurut Hodges pelayanan berasal dari kata melayani, yang berarti orang yang pekerjaannya melayani kepentingan dan kemauan orang lain. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.²⁷

Beberapa unsur yang terkandung dalam pengertian pelayanan yaitu:

1. Pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan lembaga atau aparat pemerintah maupun swasta.
2. Objek yang dilayani adalah masyarakat (publik) berdasarkan kebutuhannya.

²⁷ Nurfadillah Fajri Hurriyah, *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Tajalar*, Jurnal Universitas Negeri Makassar, hlm 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa barang atau jasa.
4. Ada aturan atau sistem dan tata cara yang jelas dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.²⁸ Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; agar terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; agar terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan agar terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam perundang-undangan..²⁹

²⁸ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2006) hlm 5

²⁹ Ibid. hlm 18

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, standar pelayanan wajib disusun oleh penyelenggara dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Dengan menerapkan standar pelayanan publik dengan baik, diharapkan penyelenggaraan pelayanan publik dapat menghasilkan kepuasan masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggara dituntut untuk menerapkan prinsip efektif, efisien, inovasi dan komitmen mutu. Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat.

B. Jenis - jenis Pelayanan dan Pola Pelayanan

Kewajiban Pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warganegara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara. Kewajiban pemerintah, maupun hak setiap warga negara pada umumnya disebutkan dalam konstitusi suatu negara.

Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pelayanan, yaitu:

Pertama: Pelayanan Administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan / Penguasaan Tanah dan sebagainya.

Kedua : Pelayanan Barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk / jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.

Ketiga : Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya.³⁰

Pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola, yaitu:

Pertama : Pola Pelayanan Teknis Fungsional. Adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangannya.

Kedua : Pola Pelayanan Satu Pintu. Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan.

Ketiga : Pola Pelayanan Satu Atap. Pola pelayanan disini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing.

Keempat : Pola Pelayanan Terpusat. Adalah pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator

³⁰ <http://tentangpelayananpublik.blogspot.com>

terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan.

Kelima : Pola Pelayanan Elektronik. Adalah pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomatisasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat on-line sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas pelanggan.

C. Tujuan Pelayanan Publik

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidakpastian untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks, sementara itu, tatanan masyarakat baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipengaruhi oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi investasi, dan perdagangan. Sehingga pelayanan publik memiliki tujuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 25/2003. Tujuan pelayanan publik menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan, dan korporasi yang baik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Prinsip Pelayanan Publik

Sesuai dengan keppres no. 63/2003 prinsip penyelenggaraan pelayanan publik adalah sebagai berikut:³¹

1. Kesederhanaan; prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit dan mudah dipahami
2. Kejelasan; mencakup kejelasan dalam beberapa hal yakni sebagai berikut:
 - a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
 - b. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik
 - c. Perincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran
3. Kepastian waktu; pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
4. Akurasi; produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah
5. Keamanan; proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum

³¹ Zaenal Mukarom Dan Muhibudin Wijaya Laksana, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015) hlm. 84-85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Tanggung jawab; pimpinan yang di tunjuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat bertanggung jawab atas penyelesaian pelayanan dan penyelesaian keluhan dalam pelaksanaan pelayanan publik
7. Kelengkapan sarana dan prasarana artinya dalam pelayanan publik kelengkapan sarana dan prasarana sangatlah mendukung dalam pelaksanaan pelayanan publik.
8. Kemudahan akses tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan serta keikhlasan dalam memberikan pelayanan
10. Kenyamanan; lingkungan pelayanan harus tertib teratur, ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, serta disediakan fasilitas pendukung seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain sebagainya.

E. Asas Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan publik terdapat beberapa asas pelayanan publik, asas pelayanan publik tersebut sesuai dengan Kep. Menpan No. 63/2003 tentang penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas sebagai berikut:³²

1. Transparansi; bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan dan disediakan secara memadai serta mudah dipahami
2. Akuntabilitas; dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Kondisional; sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berprinsip pada efisiensi dan efektivitas

³² Ibid. hlm. 92

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Partisipatif; mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan memerhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat
5. Kesamaan hak; tidak diskriminatif, dalam arti membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi
6. Keseimbangan hak dan kewajiban; pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Sedangkan menurut pasal 4 No. 25 Tahun 2009, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:³³

1. Kepentingan umum maksudnya pemberian layanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan / golongan
2. Kepastian hukum maksudnya jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan
3. Kesamaan hak maksudnya pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi
4. Keseimbangan maksudnya hak dan kewajiban pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan
5. Keprofesionalan maksudnya pelaksana pelayanan publik harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas

³³ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Pasal 4 No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

6. Partisipatif maksudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat
7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif maksudnya setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil
8. Keterbukaan maksudnya setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan publik yang diinginkan
9. Akuntabilitas maksudnya proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan maksudnya pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan
11. Ketepatan waktu maksudnya penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan standar pelayanan
12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan maksudnya setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

F. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagaimana adanya kepastian bagi pemberi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam proses pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

pelayanan publik sebagai pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonan, serta sebagai alat control masyarakat dan penerima layanan atas kinerja penyelenggara.³⁴

Oleh karena itu perlu disusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan, serta memperhatikan kebutuhan dan kondisional lingkungan. Standar pelayanan publik menurut keputusan menteri pan no. 63/kep/m.pan/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Prosedur pelayanan
2. Waktu penyelesaian
3. Biaya pelayanan
4. Sarana dan prasarana
5. Kompetensi petugas pelayanan.

G. Dimensi Pelayanan Publik

Dimensi dari pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Tangibles

Dimana dimensi ini berkaitan dengan kemoderenan peralatan yang digunakan berupa kondisi fisik perkantoran, ruang tunggu dan lain sebagainya.

³⁴ Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pamburuan, 2005) hlm. 24

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Reliability

Dimana dimensi ini berkaitan dengan menyediakan pelayanan sesuai dengan waktu yang di janjikan, penanganan keluhan konsumen atau masyarakat berupa kemampuan dan keandalan menyediakan pelayanan yang terperaya.

3. Responsiveness

Dimana dimensi ini berkaitan dengan pemberian layanan dengan cepat dan ketersediaan petugas memberi bantuan serta petugas tidak merasa sibuk untuk melayani konsumen atau masyarakat.

4. Assurance

Dimana dimensi ini berkaitan dengan kemampuan dan keramahan serta sopan santun petugas kepada konsumen atau masyarakat.

5. Emphaty

Dimensi ini berkaitan dengan sikap tegas tapi penuh perhatian.³⁵

³⁵ Ridwan dan Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: Nuansa 2009) hlm. 22



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Payung Sekaki berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 bahwa tugas dan fungsi KUA adalah: pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk; penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam; pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan; pelayanan bimbingan keluarga sakinah; pelayanan bimbingan kemasjidan; pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah; pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam; pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan; dan melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji reguler. Namun berdasarkan hasil penelitian kurang berjalan dengan baik.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 diantaranya: Lemahnya sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana yang belum memadai, dan keterbatasan anggaran.
3. Di dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* mengenai implementasi tugas dan fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di KUA Payung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sekaki ini tertuju kepada *Siyasah Dusturiyah* juga membahas tentang hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalamnya. Di KUA sendiri juga terdapat hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mana KUA menjadi *Ahlul Halli Wal 'Aqdi*, sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu atas nama umat dan juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam implementasi tugasnya KUA masih mendapatkan kendala yaitu lemahnya sumber daya manusia (SDM), kurangnya sarana prasarana dan keterbatasan anggaran yang mengakibatkan belum optimal nya pelayanan yang diberikan oleh KUA.

B. Saran

Dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan keagamaan, KUA tidak bisa mengatasi seluruhnya, terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas pelayanan masyarakat. Pelayanan KUA yang bisa dilaksanakannya terkesan hanya pencatatan nikah, sedangkan tugas-tugas lainnya banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, terutama pada pembinaan kemasjidan, pembinaan mualaf, dan pembinaan kerukunan antar umat bereagama. Dalam hal ini KUA seharusnya memiliki peran ganda, yakni tugas kedinasan dan tugas kemasyarakatan.

Karena itu, KUA secara ideal harus dekat dengan umat islam, dekat dengan masjid, dan dekat dengan sekolah-sekolah agama.

Sebagai rekomendasinya, KUA perlu diberdayakan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemerintah hendaknya menambah wawasan kinerja KUA dengan mengikutsertakan kegiatan dan orientasi berkenaan tugas dan fungsi KUA
2. Pemerintah hendaknya menambah Sarana dan Prasarana Kantor agar KUA dapat menjalankan pelayanan secara optimal





DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Zainudin, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Agung, Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Pembaharuan
- Amiruddin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rajawali Persada
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi, 1997, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*
- Djazuli, H.A, 2004, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta, Kencana
- Hardiansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*, Yogyakarta, Gava Media
- Idris, Mohd Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara
- Iqbal, Muhammad, 2014, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Gaung Persada
- Jamil, Wahab Abdul, 2014, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan
- Johan, Bahder, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Semarang, Mandar Maju
- Mukarom, Zaenal Dan Muhibudin Wijaya Laksana, 2015, *Manajemen Pelayanan Publik*, Bandung, Cv Pustaka Setia
- Nawawi, Hadari, 1993, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta, Gajah Mada
- Poltak, Lijan Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, PT.Bumi Aksara
- Ridwan dan Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qomar, Mujamil, 2012, *Kesadaran Pendidikan Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan*, Jogjakarta, Ar-Ruzz Media

Sabaruddin, Abdul, 2015, *Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Soekanto, Soerjono, 1996, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Subkhi, Ahmad dan Mohammad Januar. 2013. *Pengantar Teori Dan Perilaku Organisasi*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Surjadi, 2012, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Bandung, PT. Refika Aditama

Suria Yuyun Sumantri, 2009, *Ilmu Dalam Perspektif: Kumpulan Karangan Tentang Hakikat Ilmu*, Jakarta, Gramedia

Syaukani, Imam, 2007, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Keagamaan

Jurnal :

Syarifuddin, *Fungsional Jabatan Penghulu dan Pengaruhnya terhadap Kinerja KUA Kecamatan di Kota Manado*, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Manado

Sulaiman, *Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anumban Timur Nusa Tenggara Timur*, Jurnal Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang

Nurfadillah Fajri Hurriyah, *Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Tajalar*, Jurnal Universitas Negeri Makassar

Peraturan Menteri :

Peraturan Menteri Agama No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 4

Undang-undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat 2

Website / Situs Internet :

<https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenai-jenis-penelitiandeskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

<https://id.wikipedia.org/wiki/KantorUrusanAgama>

<http://tentangpelayanpublik.blogspot.com>

Wawancara:

Wawancara dengan Rusydi Kepala KUA Payung Sekaki, tanggal 18 Desember 2020 di kantor KUA Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Junaidi Penghulu KUA Payung Sekaki, tanggal 18 Desember 2020 di kantor KUA Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Imam Arifin selaku Tokoh masyarakat di KUA Payung Sekaki, tanggal 22 Desember 2020 di Kelurahan Sungai Sibam Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Ewi Rohaswita Pegawai KUA Payung Sekaki, tanggal 18 Desember 2020 di kantor KUA Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Nadia Hesti selaku masyarakat, tanggal 18 Desember 2020 di kantor KUA Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Liling Sasmita selaku tata usaha KUA Payung Sekaki, tanggal 18 Desember 2020 di kantor KUA Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Imam Arifin selaku Tokoh masyarakat di KUA Payung Sekaki, tanggal 22 Desember 2020 di Kelurahan Sungai Sibam Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Hasan selaku Tokoh Masyarakat di KUA Payung Sekaki, tanggal 22 Desember 2020 di Masjid Baiturrahim Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Suhaimi Penghulu KUA Payung Sekaki, tanggal 22 Desember 2020 di kantor KUA Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Wawancara dengan Syafrianto selaku masyarakat di KUA Payung Sekaki, tanggal 22 Desember 2020 di kantor KUA Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN 1

Wawancara dengan Responden

A. Identitas Informan

Nama : Rusydi, S.Ag, MH

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Payung Sekaki

Hari/Tanggal : Rabu / 18 Desember 2020

Tempat : KUA Kecamatan Payung Sekaki

1. Siapa yang membentuk KUA Kecamatan Payung Sekaki dan apa yang menyebabkan KUA Kecamatan Payung Sekaki menjadi salah satu instansi penyelenggara atau pelaksana dari Pelayanan Publik ?
2. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai Tugas dan Fungsi KUA dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama?
3. Bagaimanakah Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan, dan Pelaporan Nikah dan Rujuk di KUA Kecamatan Payung Sekaki?
4. Bagaimanakah Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam di KUA Kecamatan Payung Sekaki?
5. Bagaimanakah Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan di KUA Kecamatan Payung Sekaki?
6. Bagaimanakah Pelayanan bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Payung Sekaki?
7. Bagaimanakah Pelayanan bimbingan kemasjidan di KUA Kecamatan Payung Sekaki?
8. Bagaimanakah Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah di KUA Kecamatan Payung Sekaki?
9. Bagaimanakah Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam di KUA Kecamatan Payung Sekaki?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

10. Bagaimanakah Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf di KUA Kecamatan Payung Sekaki?
11. Bagaimanakah Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan di KUA Kecamatan Payung Sekaki?
12. Bagaimanakah KUA Kecamatan dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jemaah Haji Reguler di KUA Kecamatan Payung Sekaki?
13. Bagaimana cara KUA Kecamatan Payung Sekaki agar pelayanan Publik menjadi prima?
14. Apakah KUA Kecamatan Payung Sekaki mempunyai standar dalam bekerja?
15. Bagaimanakah tingkat kesiapan pegawai dalam proses pelayanan publik?
16. Adakah metode khusus bagi masyarakat yang ingin menyampaikan tanggapan, keluhan, saran dan lain sebagainya?
17. Apa landasan dari pelaksanaan pelayanan publik yang ada di KUA Kecamatan Payung Sekaki?
18. Apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan pelayanan publik di KUA Kecamatan Payung Sekaki?
19. Apa saja faktor pendukung dari pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Payung Sekaki?

B. Identitas Informan

Nama : Drs. H. Junaidi, MH

Jabatan : Penghulu

Hari/Tanggal : Rabu / 3 Februari 2021

Tempat : KUA Kecamatan Payung Sekaki

1. Seberapa jauh pengaruh KUA dalam kehidupan bermasyarakat?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bagaimanakah tingkat kesiapan pegawai dalam proses pelayanan publik dan apa landasan dari pelaksanaan pelayanan publik di KUA Kecamatan Payung Sekaki terutama dalam hal pelayanan pencatatan nikah?
3. Bagaimana cara KUA menjelaskan tentang pentingnya pencatatan pernikahan?
4. Apa yang menjadikan landasan KUA dalam memberikan pelayanan?
5. Apakah KUA telah melakukan sosialisasi terkait pelayanan yang diberikan kepada masyarakat?
6. Apakah KUA telah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada disekitar Kecamatan Payung Sekaki?
7. Apakah KUA Kecamatan Payung Sekaki mempunyai standar dalam bekerja?
8. Siapa saja yang menjadi objek dari pelaksanaan pelayanan publik di KUA Kecamatan Payung Sekaki?
9. Bagaimana cara pegawai dalam menanggapi keluhan/keperluan masyarakat ?
10. Bagaimana respon masyarakat ketika mendengarkan penjelasan yang disampaikan KUA?
11. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan?
12. Bagaimana cara KUA menjalin hubungan harmonis sesama pegawai?
13. Apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan pelayanan publik di KUA Kecamatan Payung Sekaki?



C. Identitas Informan

Nama : Imam Arifin

Jabatan : Tokoh Masyarakat

Hari/Tanggal : Rabu / 3 Februari 2021

Tempat : KUA Kecamatan Payung Sekaki

1. Apa berapa kelurahan di KUA Kecamatan Payung Sekaki?
2. Sudah berapa lama bapak tinggal di Kelurahan Payung Sekaki?
3. Kapan bapak pertama kali berurusan dengan KUA Kecamatan Payung Sekaki?
4. Apa yang ada rasakan selama berurusan dengan KUA Kecamatan Payung Sekaki dalam hal pelayanan pencatatan nikah?
5. Bagaimana KUA Kecamatan Payung Sekaki menanggapi keluhan masyarakat?
6. Bagimanakah kesiapan pegawai dalam proses pelayanan?
7. Menurut anda apakah proses pelaksanaan pelayanan publik yang ada di KUA Payung Sekaki sudah baik terutama dalam hal pencatatan pernikahan?
8. Apakah anda tau tentang PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan?
9. Apa harapan anda terhadap KUA Kecamatan Payung Sekaki untuk kedepannya?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

Dokumentasi di KUA Kecamatan Payung Sekaki



Halaman depan KUA Kecamatan Payung Sekaki



Ruang administrasi pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Ruangan penghulu



Balai Nikah di KUA Kecamatan Payung Sekaki



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *“Tugas dan Fungsi KUA dalam Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 di KUA Kecamatan Payung Sekaki Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”*, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Ryan Habibillah
 NIM : 11624104181
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Syamsuddin Muir, Lc, MA

Penguji I
Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag

Penguji II
Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalilus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39073
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2204/2021 Tanggal 18 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

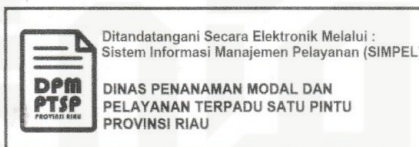
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD RYAN HABIBILLAH |
| 2. NIM / KTP | : | 11624104181 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KUA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/662/2021



Dasar

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

b. Menimbang

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39073 tanggal 25 Februari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : MUHAMMAD RYAN HABIBILLAH
2. NIM : 11624104181
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. SEMBILANG NO. 25 KEL. TANGKERANG BARAT KEC. MARPOYAN DAMAI-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 DI KECAMATAN PAYUNG SEKAKI MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
8. Lokasi Penelitian : KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 26 Februari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

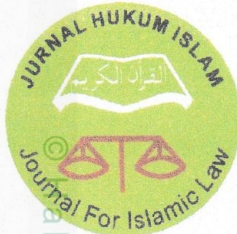
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang

University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : MUHAMMAD RYAN HABIBILLAH
NIM : 11624104181
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
JUDUL : TUGAS DAN FUNGSI KUA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 34 TAHUN 2016 MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pembimbing: Dr. H. Abu Samah, M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Juni 2021

M. Pimpinan Redaksi

M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.